

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008 - 2015**

JURNAL PENELITIAN

Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Mencapai Derajat Sarjana S1 Program
Studi Ilmu Ekonomi



Dosen Pembimbing:

DIANA WIJAYANTI, Drs., M. Si.

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIFQI INDRAWAN

14313168

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA T.A 2017/2018**

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2015

¹Muhammad Rifqi Indrawan

¹Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Abstract. This study discusses about the analysis of the influence of Domestic Investment (PMDN), Foreign Investment (PMA), Human Development Index (HDI), and Gini Index on Poverty level in Special Province of Yogyakarta period 2008 - 2015. The data used is secondary data derived from Central Bureau of Statistics data as well as publications and other sources supporting this research. The dependent variable used is the number of poor people (Y), while the independent variables are PMDN (x1), PMA (x2), IPM (x3), and Gini Index (x4). The analysis method used is panel data analysis method (pooled data) with Fixed Effect Model regression. Based on the t test that has been done using Fixed Effect Model regression, it is found that the variables PMDN, PMA, and IPM have a significant effect on the number of poor people in DIY Province with the details of investment value (PMDN and PMA) has a negative effect and the HDI has a positive effect on the dependent variable. While the Gini Index variables have a positive effect and not significant on the number of poor people in DIY Province in the period of 2008 - 2015. This is because there is still a relationship between the culture and the ability of the poor in reaching various basic needs in every day

Keywords: *DIY, PMDN, PMA, HDI, Gini Index.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap negara. Tidak memandang apakah negara tersebut maju maupun negara yang sedang berkembang, kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang terus dicarikan strategi pemecahannya. Kemiskinan memang bukan hanya masalah ketidakmampuan secara ekonomi

semata, akan tetapi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup keluarganya maupun untuk diri sendiri. Termasuk juga adanya perbedaan antara seseorang maupun kelompok terhadap yang lainnya dalam menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia pun selalu berupaya dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program – program yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi DIY. Dimuat dalam halaman *HarianJogja.com*, program – program tersebut dapat dirinci sebagai berikut, pertama, program proteksi yang berguna untuk memberikan perlindungan bagi ketidakberdayaan penduduk miskin, kedua, program pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan ketiga, sebagai yang terakhir yaitu program pemberian akses perekonomian dengan penciptaan banyak lapangan kerja baru sebagai upaya dalam menurunkan tingkat pengangguran yang ada. (Jiwana, 2017)

Namun tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain khususnya di seluruh provinsi di pulau Jawa dilihat dari persentase kemiskinan di setiap provinsi. Bahkan, persentase

penduduk miskin DIY selalu berada di atas angka nasional yang mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dapat menjadi perhatian khusus dalam rangka penciptaan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase penduduk miskin provinsi di pulau Jawa tahun 2008-2015

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	4.29	3.62	3.48	3.75	3.70	3.72	4.09	3.61
Jawa barat	13.01	11.96	11.27	10.65	9.89	9.61	9.18	9.57
Jawa tengah	19.23	17.72	16.56	15.76	14.98	14.44	13.58	13.32
DI Yogyakarta	18.32	17.23	16.83	16.08	15.88	15.03	14.55	13.16
Jawa timur	18.51	16.68	15.26	14.23	13.08	12.73	12.28	12.28
Banten	8.15	7.64	7.16	6.32	5.71	5.89	5.51	5.75
Indonesia	15.42	14.15	13.33	12.49	11.66	11.47	10.96	11.13

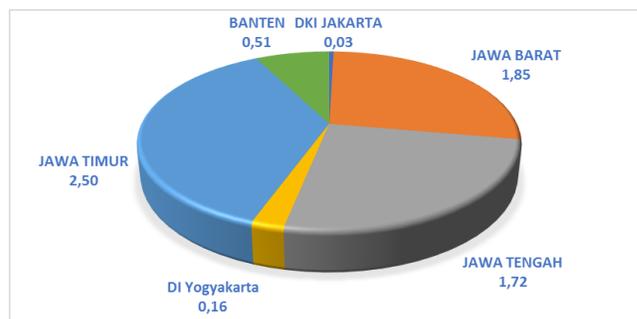
Sumber : Badan Pusat Statistika

Dari tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menempati posisi pertama sebagai daerah termiskin di pulau Jawa. Data menunjukkan presentase penduduk miskin di DIY masing – masing sebesar **15,03%** dan **14,55 %**. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012, namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi terbesar di antara seluruh provinsi di Jawa. (Atmasari, 2017) Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu provinsi pastilah tidak terlepas dari factor – factor yang menyebabkan kemiskinan tersebut dapat terjadi. Dari sinilah factor – factor tersebut dapat dijadikan pedoman bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang sedang menimpa daerah tersebut.

Hal ini menjadi menarik karena jika dilihat menurut luas wilayah provinsi se – Jawa terhadap Indonesia, persentase luas wilayah DIY terhadap Indonesia dengan provinsi lain se- Jawa hanya sebesar 0,16 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin DIY se-Jawa adalah sebesar 13,16 persen yang merupakan angka tertinggi setelah provinsi Jawa Tengah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa DIY merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang

cukup tinggi. Berikut penulis hadirkan persentase luas wilayah setiap provinsi se-jawa terhadap luas Indonesia.

Gambar 1 Persentase Luas Wilayah Provinsi se-Jawa Terhadap Luas Wilayah Indonesia



Sumber : BPS (diolah)

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus tidak lain adalah berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin. Termasuk juga di dalamnya upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari factor – factor yang mempengaruhi angka kemiskinan tersebut dapat terjadi. Seperti tingkat investasi, kesehatan, Pendidikan, distribusi pendapatan maupun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Dari data BPS Yogyakarta, berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010–2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai Rp. 18,47 triliun, kemudian terus meningkat menjadi Rp. 23,26 triliun pada tahun 2015. Secara umum rata-rata pertumbuhan investasi di DIY selama periode 2010 - 2015 sebesar 4,73 persen per tahun (BPS DIY) (BAPPEDA, 2016). Hal ini menunjukkan perkembangan yang terus menerus terjadi pada sektor investasi di Provinsi DIY.

Selain itu kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi factor penyebab terjadinya penduduk miskin di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia pun dapat dilihat melalui indeks kualitas hidup / Indeks Pembangunan Manusia. Data dari BPS menunjukkan pada tahun 2015 IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 77,59 menempati posisi tertinggi di Indonesia, setelah IPM Provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka 78,99 menempati posisi

tertinggi pertama di Indonesia. Hal ini dapat dirinci bahwa IPM DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar 78,39, atau meningkat 0,77% dibanding IPM tahun 2015 sebesar 78,99. Sedangkan IPM DIY tahun 2014 sebesar 76,81 atau meningkat 1,02% dibanding IPM tahun 2015 sebesar 77,59 (Sihombing, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa DIY memiliki tingkat pembangunan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang lain.

Dalam masalah kemiskinan juga terdapat indikator yang berkaitan dengan kesenjangan distribusi pendapatan, karena kesenjangan distribusi pendapatan berkaitan erat dengan kemiskinan. Indikator tersebut adalah indeks gini yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistika Yogyakarta (1994) indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah indeks gini dan kriteria bank dunia. Kriteria bank dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : (1) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (2) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% - 17% bagian pendapatan; (3) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis mencoba meneliti dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?
2. Apakah variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?

3. Apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?
4. Apakah variabel Indeks Gini berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2008 – 2015?

3. Tujuan Penelitian

Penulis dalam pembahasan kali ini membagi tujuan penelitian menjadi dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum penulis dalam melakukan pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi gejala – gejala yang menyebabkan kemiskinan di provinsi Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut sekaligus sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan kedepannya. Sedangkan tujuan khusus penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Yogyakarta tahun 2008 - 2015
2. Membuktikan adanya pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) provinsi Yogyakarta tahun 2008 – 2015 terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tersebut
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Yogyakarta tahun 2008 - 2015
4. Mengetahui pengaruh Indeks Gini terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Provinsi Yogyakarta tahun 2005 -2015.

4. Manfaat Penelitian

Tentunya dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang besar kepada pihak – pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemegang kebijakan, hasil dari penelitian ini diperlukan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan program pengentasan

kemiskinan di provinsi Yogyakarta dengan melihat pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan dari setiap variabel yang ada.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi Yogyakarta
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diperlukan untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal penentuan kebijakan terkait program pengentasan kemiskinan.
4. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun referensi untuk melaksanakan penelitian kedepannya atau sekaligus dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

5. Metodologi Penelitian

Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan alat analisis panel data atau data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data. Data panel adalah data regresi penggabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal, atau tahunan. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. (Widarjono, 2009)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang kita peroleh dari sumber kedua dan biasanya data seperti ini sudah siap pakai. Data sekunder seperti ini mudah didapatkan dan tersebar luas diberbagai sumber. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber – sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder tersebut yang digunakan sebagai variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk variabel independen adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini, semuanya pada rentang waktu antara tahun 2008 – 2015 di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Melihat dan mengkaji pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang sama maupun yang berbeda pokok pembahasannya, maka kajian pustaka yang akan dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini melalui konsep – konsep yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian Hastina Febrianty dkk (2017) tentang kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dengan judul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, adapun data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu (*time series*) selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2015 yang berasal dari badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan dari laporan – laporan tahunan dan Bank Indonesia (BI) dari Kajian Ekonomi Regional khusus SUMUT. Dari hasil olah data yang ada menghasilkan bahwa variabel PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi SUMUT yang menunjukkan bahwa hasil ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian. Sedangkan untuk variabel Investasi (PMDN) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada. (Febriaty, 2017)

Penelitian tentang variable yang mempengaruhi kemiskinan juga pernah dilakukan oleh Adi Widodo dkk (2011). Yaitu tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sector Pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dengan periode kajian studi adalah antara tahun 2007 – 2008. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sector public tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara

bersama-sama (simultan) pengeluaran sector public dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. (Widodo, 2011)

Penelitian lain tentang kemiskinan juga dilakukan oleh Teddy Desly dkk (2017). Dengan menggunakan variable belanja langsung, belanja tidak langsung pemerintah daerah dan investasi swasta. Penelitian ini menghasilkan bahwa variable – variable yang ada mulai dari belanja langsung, belanja tidak langsung, serta investasi ternyata memiliki pengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan yang ada. (Minggu 2017)

Penelitian lain tentang kemiskinan juga dilakukan oleh Anton Tri (2016) tentang “Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010”. Salah satu hasilnya adalah bahwa variabel ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data indeks gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan walaupun jika dilihat secara statistik variabel tersebut tidak bersifat signifikan. (Wijayanto, 2016)

2. LANDASAN TEORI

I. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, Pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS, 2016)

Ada beberapa indikator kemiskinan yang biasanya digunakan antara lain :

1. Kemiskinan Relatif

Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relative jika pendapatannya berada di bawah pendapatan disekitarnya atau dalam kelompok masyarakat tersebut di lapisan paling bawah meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok namun karena

dibandingkan masyarakat disekitarnya pendapatannya dinilai rendah maka orang tersebut termasuk miskin.

2. Kemiskinan Absolut

Dapat diketahui dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, pemukiman, Pendidikan dan kesehatan. Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok maka orang tersebut dikatakan miskin.

3. Kemiskinan Kultural

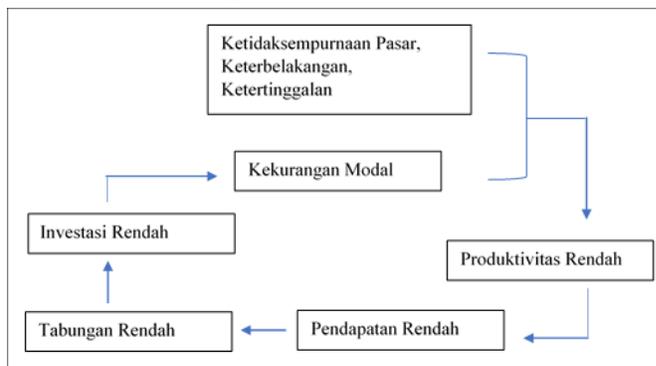
Kemiskinan ini biasanya disebabkan oleh keadaan kultur di masyarakat, serta dapat dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon pendapat ataupun masukan dari pihak lain yang ingin membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang di sebabkan oleh struktur ataupun system ekonomi yang tidak berpihak kepada yang miskin, sehingga mengakibatkan munculnya masalah – masalah struktur ekonomi yang menyampingkan peranan orang miskin.

II. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Gambar 2 Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse



Sumber : Nurkse dalam Kuncoro, 2006

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi jug disebabkan oleh ahmbatan pemabngunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “ Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*).

Nurkse juga berpendapat bahwa inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan – keadaan yang

menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Pembentukan modal di satu pihak ditentukan oleh tingkat tabungan sedangkan di pihak lain oleh perangsang untuk menanam modal. Kedua faktor ini masih sangat sulit dilaksanakan di Negara Berkembang guna mendapatkan pembentukan tingkat modal yang tinggi. Sehingga, menurut Nurkse, ada dua jenis lingkaran seta kemiskinan yang menghalangi Negara Berkembang dalam mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

III. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

1. Investasi

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. (Mankiw, 2003)

Pengairahan iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang – Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang – Undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 tahun 1977 tentang PMA disempurnakan dengan UU no. 11 tahun 1970 dan UU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU no. 12 1970. (Prasetyo, 2018)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat 2 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 9 tentang penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik

yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk mendapatkan akses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM dihitung berdasarkan data – data yang dapat menggambarkan komponen – komponen yang terkait yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang mewakili bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata- rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup lebih layak. (BPS, 2017)

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Kotambunan, 2016)

3. Indeks Gini

Kuncoro (2006) dalam bukunya menyebutkan bahwa indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. (Kuncoro, 2006)

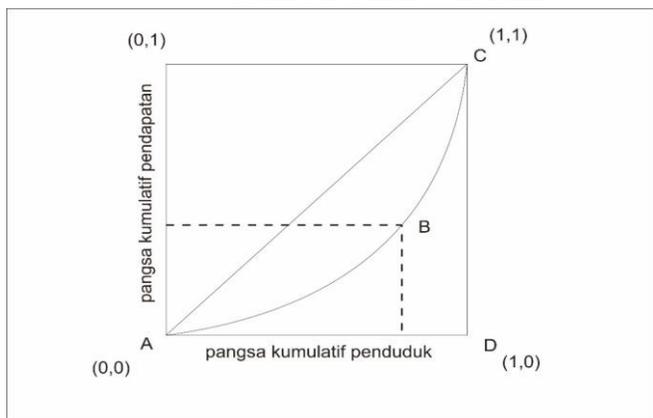
Adapun nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata untuk seluruh unit masyarakat (perfect equality), sedang nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya

dimiliki oleh satu orang atau satu unit saja pada keseluruhan distribusi (perfect inequality). Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai Indeks Gini sebesar 0,4 atau di bawahnya. Ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai Indeks Gini di atas 0,4 dalam distribusinya .

Indeks Gini seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dan penduduk. G sebagai Indeks Gini yang diturunkan dari Kurva Lorenz dengan cara membagi daerah yang dibatasi oleh garis diagonal dan kurva Lorenz dengan total daerah pada segitiga yang lebih rendah, yakni :

$$G = \frac{\text{daerah di antara AC dan ABC}}{\text{Seluruh daerah ACD}}$$

Gambar 3 Kurva Lorenz



Sumber : Dowling & Valenzuela dalam Kuncoro (2006)

IV. Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

Dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah dipengaruhi oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat investasi, IPM, dan Indeks Gini merupakan hal – hal yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut. Yaitu yang memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada pada variabel tingkat investasi, dan IPM. Serta berpengaruh positif pada variable Indeks gini.

Peningkatan ketiga variable dengan hubungan negative tersebut pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan produktivitas yang dimiliki oleh seseorang. Ketika investasi meningkat, maka akan banyak tercipta lapangan kerja yang

kemudian dapat mengurangi tingkat pengangguran guna menurunkan angka kemiskinan. Begitu pula pada peningkatan pembangunan manusia yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan meningkatnya produktivitas penduduk, hal tersebut akan mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada gilirannya akan mampu dengan sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Sedangkan pada variable Indeks gini, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang semakin besar antara pendapatan penduduk terendah dan tertinggi akan semakin menambah tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses yang dimiliki oleh masyarakat rendah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi keluarganya yang pada gilirannya akan semakin menambah jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi tersebut.

V. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara dan dianggap benar, agar dapat ditarik sebuah konsekuensi logis, maka perlu diadakan sebuah pengujian untuk mengetahui kebenarannya melalui metode – metode pengujian dengan menggunakan data – data hasil dari penelitian. Adapun hipotesis ini digunakan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya dapat mempunyai arah sesuai dengan apa yang sedang diinginkan. Hipotesis – hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015
2. Diduga Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015
3. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015

4. Diduga Indeks Gini berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 – 2015.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) merupakan nama yang diberikan oleh Paku Buwono II (Raja Mataram tahun 1719 - 1727) menggantikan nama Pesanggrahan Gartitawati. Nama Yogyakarta yang berarti Yogya yang Kerta atau Yogya yang makmur juga sering disebut dengan *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Adapun sumber lain ada yang mengatakan bahwa nama Yogyakarta diambil dari nama ibu kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari – hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa jawa). Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri sejak tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang nantinya bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sedangkan Kadipaten Pakualaman, didirikan oleh Pangeran Notokusumo sejak tahun 1813 yang kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. (Dinas Pendidikan, 2018)

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3.679.179 jiwa. Adapun jumlah penduduk laki – laki sebesar 49,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 50,57 persen, dengan 66,74 persen penduduk kota dan 33,26 persen penduduk desa menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 back casting. Namun jika dilihat dari segi kepadatan penduduk dengan luas wilayah sebesar 3.185,80 km² tercatat di DIY sebesar 1.155 jiwa per km². Yaitu dengan rincian bahwa kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dengan 12.699 jiwa per km² yang memiliki luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas Provinsi DIY. Berbalik keadaan dengan daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan wilayah terluas di DIY yaitu mencapai 46,63 persen, memiliki kepadatan penduduk terendah yang hanya dihuni rata – rata 482 jiwa per km² nya. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini : (BPS, 2016)

Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2015

Kabupaten / Kota	Luas Km2	Jumlah	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan
			(Orang/Km2)	Penduduk 2010(%)
Kulonprogo	586,27	412.198,00	703,00	1,12
Bantul	506,85	971.511,00	1.917,00	1,32
Gunung Kidul	1.485,36	715.282,00	482,00	1,09
Sleman	574,82	1.167.481,00	2.031,00	1,13
Kota Yogyakarta	32,50	412.704,00	12.699,00	1,27
DIY	3.185,80	3.679.176,00	1.155,00	1,19

2. Hasil Analisis Regresi

Pemodelan dengan menggunakan regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode dalam pengolahannya. Pendekatan – pendekatan tersebut antara lain : *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Berikut pengaplikasian serta penjabaran dari ketiga pendekatan metode yang telah disebutkan tersebut :

I. Uji Chow

Metode ini digunakan untuk membandingkan model yang terbaik antar dua model yaitu *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitasnya dengan nilai alfa. Dari hasil regresi yang telah dilakukan dalam membandingkan antara dua model CEM dengan FEM diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2656.603092	(4,191)	0.0000
Cross-section Chi-square	807.327789	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data pada *Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F test sebesar 0.0000 < 0.05 yang artinya menolak Ho atau menerima Ha, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

II. Uji Hausman

Metode ini digunakan untuk membandingkan model terbaik antara dua model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM) dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitasnya dengan nilai alfa. Dari hasil regresi yang telah dilakukan dalam membandingkan antara dua model REM dengan FEM diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Regresi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10626.412370	4	0.0000

Sumber : Hasil olah data pada *Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F – statistik sebesar $0.0000 < 0.05$ yang artinya menolak H_0 atau menerima H_a , sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

III. Estimasi Fixed Effect Model

Model *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu data diakomodasi dari perbedaan interseptnya. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5 Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/28/18 Time: 19:23
Sample: 2008 2015
Included observations: 40
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.80104	16.71258	3.279030	0.0012
X1?	-0.010324	0.002602	-3.967958	0.0001
X2?	-0.034503	0.009923	-3.477126	0.0006
X3?	0.824163	0.225578	3.653559	0.0003
X4?	9.568741	7.541996	1.268728	0.2061
Fixed Effects (Cross)				
_BNT--C	39.33677			
_GK--C	44.73520			
_KLP--C	-24.39247			
_KY--C	-69.24399			
_SLM--C	9.564488			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989412	Mean dependent var	111.9028
Adjusted R-squared	0.988969	S.D. dependent var	44.76499
S.E. of regression	4.701630	Akaike info criterion	5.977652
Sum squared resid	4222.117	Schwarz criterion	6.126076
Log likelihood	-588.7652	Hannan-Quinn criter.	6.037717
F-statistic	2231.108	Durbin-Watson stat	1.783620
Prob(F-statistic)	0.000000		

IV. Koefisien Determinasi (R²)

R² yang dihasilkan dari estimasi dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan hasil sebesar 0.989412 yang menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independent yang ada yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini sebesar 98,94 % dan sisanya yaitu sebesar 1,06% dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar variabel model yang digunakan.

V. Uji F

Uji F dilakukan adalah untuk mengetahui apakah variabel – variabel independen secara bersama – sama telah dapat mempengaruhi variabel dependen yang ada atau tidak. Pada estimasi kali ini nilai F hitung menunjukkan angka sebesar 2231.108 dengan nilai probabilitas F hitung sebesar 0.000000. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa dengan $\alpha = 5\%$, F hitung menolak H_0 yang berarti secara estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), variabel – variabel independen yang digunakan yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Indeks Gini secara bersama – sama telah mempengaruhi variabel dependen yang ada yaitu jumlah penduduk miskin di DIY secara signifikan.

VI. Uji t

Uji t adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dari hasil estimasi di dapatkan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari alfa 1% yaitu yang berturut – turut 0.0001; 0.0006; 0.0003 (probabilitas < 0.01). Sehingga memberikan hasil menolak H_0 yang berarti bahwa variabel yang ada berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan). Berbeda dengan variabel Indeks Gini yang tiak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan) karena memiliki nilai probabilitas $>$ alfa 10% yaitu 0.2061 yang berarti gagal menolak H_0 .

VII. Analisis Ekonomi

1. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan dari nilai probabilitas t-statistik PMDN terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.0001, maka PMDN berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan karena nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari alfa 1% ($0.0001 < 0.05$). sehingga secara statistik variabel PMDN (X1) telah dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Adapun koefisien yang dihasilkan oleh variabel PMDN (X1) adalah sebesar -0.010324 yang berarti bahwa setiap kenaikan Rp 1 Milyar jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri akan menurunkan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 0.010324 ribu jiwa setiap tahunnya.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan bahwa PMDN akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang ada. Hal inipun sejalan sesuai dengan penelitian dari (Priyanto, 2018) yang meneliti pengaruh investasi PMA dan PMDN terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Yaitu dengan hasil bahwa adanya pengaruh negatif tidak langsung dan signifikan antara variabel PMDN dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini karena dengan meningkatnya jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan bertambah pulalah jumlah PDRB yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pendapatan yang berlebih itulah yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan sektor – sektor ekonomi yang dibutuhkan. Seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan UMKM, atau peningkatan kesempatan lapangan kerja baru yang pada gilirannya dapat menekan jumlah penduduk miskin yang ada di suatu daerah. Namun, investasi dapat memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin jika investasi yang ada hanya bersifat padat modal dan dinikmati oleh golongan tertentu saja. Hal ini yang juga ditunjukkan melalui penelitian dari (Febriaty, 2017) yang menghasilkan penelitian bahwa variabel investasi akan berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat jika proses investasi yang dilakukan juga tidak memiliki peran terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Dalam artian bahwa

hasil investasi hanya dapat dinikmati oleh para investor dan kalangan menengah atas saja.

2. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai probabilitas t-statistik PMA terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.0006, maka PMA berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada alfa 1% karena nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari alfa 1% ($0.0006 < 0.01$). sehingga secara statistik variabel PMA (X2) telah dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y). Adapun koefisien yang dihasilkan oleh variabel PMA (X2) adalah sebesar -0.034503 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta Dollar PMA DIY akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0.034503 ribu jiwa setiap tahunnya.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan bahwa PMA akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang ada di DIY. Masih sejalan dengan PMDN yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa hasil inipun memiliki kesimpulan yang sama pula dari penelitian (Priyanto, 2018) dan juga (Momongan, 2013) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) ke suatu daerah akan berdampak meningkatnya pendapatan daerah melalui PDRB yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan pembangunan daerah tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur maupun pembukaan banyak kesempatan kerja baru. Dengan banyaknya tenaga kerja yang akan diserap melalui proyek – proyek baru PMA nantinya akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan terwujudnya pembangunan ekonomi tersebutlah akan berpengaruh terhadap turunnya tingkat kemiskinan yang ada.

3. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai probabilitas t-statistik IPM terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.0003, maka IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada alfa 1% karena nilai probabilitas t-statistik yang lebih

kecil dari alfa 1% ($0.0003 < 0.1$). Sehingga secara statistik variabel IPM (X3) telah dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Adapun koefisien yang dihasilkan oleh variabel IPM (X3) adalah sebesar 0.824163 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen IPM setiap tahunnya akan menaikkan pula jumlah penduduk miskin sebesar 0.824163 ribu jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil tersebut tentunya tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan di awal yang menyatakan bahwa variabel IPM akan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di DIY. Hal inipun tentunya juga tidak sesuai dengan jurnal penelitian dari (Kotambunan, 2016) dan juga (Suliswanto, 2010) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005 – 2014 dan juga di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2006 – 2008 yang menyatakan bahwa adanya korelasi atau hubungan negatif secara signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan yang ada.

Melalui penelitian dari (Wati, 2015) mungkin sesuatu yang bertolak belakang tersebut dapat dijelaskan. Dalam hasilnya peneliti menyebutkan bahwa IPM yang berpengaruh positif tersebut dapat terjadi karena adanya program pembangunan pemerintah yang menyangkut tiga indikator IPM seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat masih kurang optimal. Belum optimalnya program pembangunan yang mencakup 3 indikator tersebut dapat dirasakan dengan belum banyaknya program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin.

Jika kita melihat kondisi Provinsi DIY yang seakan menunjukkan kondisi masyarakat yang “miskin tetapi sejahtera” ini, mungkin hal tersebut dapat dijelaskan. Dalam sektor pendidikan misalnya, Provinsi DIY telah didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian yang memang keduanya tidak begitu memerlukan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (Niswati, 2013).

Belum lagi jika kita melihat tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi DIY yang menunjukkan angka sebesar 0,425 persen. Angka ini merupakan angka ketimpangan

tertinggi di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka ketimpangan yang terjadi di Provinsi DIY. Hasil riset dari Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta menemukan bahwa tingginya angka ketimpangan di DIY ditandai oleh adanya problem penguasaan aset produktif, yakni lahan pertanian. Keterbatasan aset lahan pertanian yang telah menopang hidup bagian terbesar penduduk DIY inilah yang kemudian mendorong masyarakat pedesaan beralih pada sektor – sektor informal sebagai sumber penghidupan. Sehingga menimbulkan masih kurangnya aktivitas dalam mendorong tumbuhnya perekonomian di pedesaan. (Sutaryono, 2018)

Kenaikan IPM seharusnya dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY. Pemerintah sekiranya perlu memperhatikan fenomena – fenomena yang terjadi dalam hal ini. Sehingga dengan adanya program – program peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia yang ada, dapat dibarengi dengan semakin terbukanya akses masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan semakin tingginya produktivitas seseorang, maka sesungguhnya dapat lebih mudah untuk keluar dari jurang kemiskinan.

4. Analisis Indeks Gini Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai probabilitas t-statistik Indeks Gini terhadap kemiskinan menunjukkan hasil sebesar 0.2061, maka Indeks Gini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan yang ada karena nilai probabilitas t-statistik yang besar dari alfa 10% ($0.02061 > 0.1$). Sehingga secara statistik variabel Indeks Gini (X4) tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Adapun nilai koefisien yang dihasilkan oleh variabel Indeks Gini (X4) adalah sebesar 9.568741 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen Indeks Gini akan berpengaruh terhadap naiknya jumlah penduduk miskin DIY sebesar 9.568741 ribu jiwa setiap tahunnya.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang ada. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanto, 2016) dan juga (Atmojo, 2018) yang meneliti pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap

pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010 dan juga di provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016 yang menghasilkan bahwa indeks gini berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Artinya jika terjadi peningkatan pada nilai indeks gini, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Dalam penelitian kali ini, nilai Indeks Gini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY. Hal tersebut disebabkan karena mungkin masyarakat miskin masih dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap harinya. Sehingga dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang begitu tinggi bahkan berada pada posisi tertinggi di Indonesia dengan persentase mencapai 0,43 persen, hal tersebut bukan menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk miskin di Provinsi DIY. Hal tersebut dapat dilihat melalui data dari BPS yang menyatakan bahwa DIY merupakan daerah cukup bahagia dengan nilai indeks kebahagiaan masyarakat mencapai 70,77 persen dari skala indeks 0 – 100. Hasil tersebut kata Bambang Kristanto selaku kepala BPS Yogyakarta yang dimuat dalam situs republika.co.id merupakan skala yang masuk dalam kategori cukup bahagia di atas rata – rata. Indeks Kebahagiaan tersebut disusun atas tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial di DIY. Artinya adalah bahwa penduduk DIY telah merasa cukup bahagia yang diukur melalui 10 aspek tersebut yang telah merefleksikan tingkat kebahagiaan penduduk (Maharani, 2018). Walaupun tetap, ketimpangan yang terjadi di DIY merupakan masalah yang serius dan akan terus dicarikan solusi pemecahannya.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode tahun 2008 – 2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digambarkan dengan menggunakan data PMDN dalam satuan milyar rupiah pada setiap masing – masing

Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di masyarakat akan menyebabkan penurunan pada jumlah penduduk miskin.

2. Penanaman Modal Asing (PMA) yang digambarkan dengan menggunakan data PMA dalam satuan juta dollar pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di masyarakat akan menyebabkan penurunan pada jumlah penduduk miskin.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan satuan persen pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Hal inipun menunjukkan bahwa adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY, maka akan menyebabkan kenaikan pula terhadap jumlah penduduk miskin. Jika dilihat lagi maka hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan teori pembangunan manusia. Karena jika kualitas seseorang meningkat maka akan meningkat pulalah produktivitas seseorang tersebut yang pada gilirannya nanti akan mempermudah dia keluar dari jurang kemiskinan. Penyebab keadaan yang bertolak belakang tersebut adalah karena adanya program pembangunan pemerintah yang menyangkut tiga indikator IPM yaitu seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat berjalan kurang optimal. Belum optimalnya program pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dengan belum banyaknya program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi para penduduk miskin.

4. Indeks Gini yang menggunakan satuan persen pada setiap masing – masing Kabupaten / Kota di Provinsi DIY memiliki pengaruh tidak signifikan yang positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan di awal bahwa nilai

Indeks Gini akan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun dalam penelitian ini Indeks Gini tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut disebabkan karena mungkin masyarakat miskin masih dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap harinya. Sehingga dengan adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat bukan menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY. Walaupun tetap, ketimpangan yang terjadi di DIY masih merupakan masalah yang serius dan akan terus dicarikan solusi pemecahannya.

2. Implikasi

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal tersebut menimbulkan adanya implikasi sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh signifikan yang negatif antara PMDN dan PMA terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY menunjukkan suatu sinyal tersendiri sebagai salah satu faktor yang mampu menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Untuk itu pemerintah Provinsi DIY khususnya yang berada di masing – masing Kabupaten/Kota di DIY dapat terus berupaya dalam meningkatkan nilai investasi yang terjadi di setiap daerahnya tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuka banyak kran investasi di berbagai sektor seperti pariwisata atau jasa maupun dengan mempermudah proses investasi yang terjadi di suatu daerah mulai dari registrasi maupun proses izin yang ada di dalamnya. Proses distribusi hasil investasi tersebutlah yang mungkin perlu diingat agar memberikan dampak terhadap perekonomian secara luas dan bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja.
2. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan namun positif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY. Untuk itu berbagai program pembangunan kualitas manusia yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY khususnya yang ada di masing – masing Kabupaten/Kota di DIY harus dapat memberikan akses terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pengalih fungsian lahan pertanian menjadi

perhotelan maupun perumahan dapat menurunkan kepemilikan aset produktif yang dimiliki oleh para petani. Redistribusi aset terhadap para petani dapat dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya dalam meningkatkan akses masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya disamping dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menekan laju ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

3. Indeks Gini memiliki pengaruh tidak signifikan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi DIY. Walaupun Indeks Kebahagiaan di DIY menunjukkan angka relatif tinggi yang menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi seakan tidak menjadi masalah yang serius bagi penduduk miskin, akan tetapi ketimpangan tetap menjadi masalah perekonomian yang harus dicarikan solusi pemecahannya. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat seperti peningkatan pembangunan daerah pinggir guna mengurangi ketimpangan yang terjadi antar daerah maupun peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi terhadap masyarakat miskin di DIY.

Kemiskinan yang terjadi di Provinsi DIY memberikan warna tersendiri terhadap program – program penanggulangan kemiskinan di Provinsi tersebut. Terdapat beberapa anomali yang terjadi jika kita melihat kemiskinan di DIY dari berbagai aspek keadaan. Hal tersebutlah yang juga sebenarnya melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Jika kita melihat dari sisi yang mungkin berbeda, angka kemiskinan DIY selalu menunjukkan nilai yang selalu tinggi. Telah banyak pula informasi – informasi yang didapat dimana beberapa masyarakat yang sebenarnya telah tergolong mampu, ternyata masih ikut andil dalam penerimaan bantuan untuk masyarakat miskin. Untuk itu, perlu juga sekiranya adanya validasi data terkait jumlah penduduk miskin yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Yaitu yang dapat dilakukan oleh pemerintah bahkan dari tingkat terkecil seperti ketua RT/RW yang seharusnya lebih mengerti keadaan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat di lokasi tersebut. Sehingga tercipta keadaan yang lebih konkrit dalam melakukan

perumusan program – program penanggulangan kemiskinan kedepannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggriansyah, B. (2016). *Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Gini Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2013*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UII.
- Antara. (2017, Maret 25). *Sistem Pendidikan Yogyakarta Dinilai Jauh Dari Sempurna*. Diambil kembali dari <http://www.sinarharapan.co>
- Atmasari, N. (2017, Maret 25). *DIY Provinsi Termiskin di Jawa*. Diambil kembali dari <http://www.harianjogja.com>
- Atmojo, D. (2018, Februari 08). *Analisis Pengaruh Gini Ratio, IPM, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016*. Diambil kembali dari repository.ums.ac.id
- Bappeda. (2016). *Analisis ICOR Sektorial Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 - 2015*. Yogyakarta: BPS.
- BAPPEDA, B. d. (2016). *Analisis Icor Sektorial Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *DIY Dalam Angka*. Yogyakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Dinas Pendidikan, P. d. (2018, Januari 14). *Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diambil kembali dari [Pendidikan-diy.go.id: http://www.pendidikan-diy.go.id](http://www.pendidikan-diy.go.id)
- Febriaty, H. (2017). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2.
- Firman, G. R. (2018, Februari 08). *Jogja Istimewa (Timpang)*. Diambil kembali dari [kompasiana.com: https://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Jiwana, G. (2017, April 30). *Atasi Kesenjangan Kemiskinan, Ini Program Pemerintah*. Diambil kembali dari : <http://www.harianjogja.com>
- Kotambunan, L. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 01.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Maharani, E. (2018, Februari 08). *Survei BPS, Masyarakat DIY Bahagia di atas Rata - Rata*. Diambil kembali dari <http://www.republika.co.id>
- Mankiw, N. G. (2006). *Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga .
- Minggu, T. D. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 18, No. 2.
- Momongan, J. E. (2013). Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal E MBA*, Vol. 1 No.3.
- Niswati, K. (2014). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 - 2011. *Eko-Regional*, Vol. 9, No. 2, 87.
- Nuraini. (2016). Analisis Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1.
- Prasetyo, E. (2018, Februari 03). *Analisis Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Periode Tahun 1985-2009*. Diambil kembali dari <http://lib.unnes.ac.id>
- Priyanto, D. (2018, Februari 04). *Analisis Pengaruh PMA, PMDN, dan Laju Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1990-2003*. Diambil kembali dari <https://digilib.uns.ac.id>
- Putra, A. N. (2013). *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa*. Jakarta: Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.

- Reza Lainatul Rizky, d. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *JESP - Vol. 8, No. 1*
- Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa. *Artikel - Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*.
- Sihombing, M. (2017, Maret 25). *Indeks Pembangunan Manusia : DKI dan Yogyakarta Tertinggi*. Diambil kembali dari: <http://kabar24.bisnis.com>
- Sjahroni, B. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: deepublish.
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8 No. 2.
- Sutaryono. (2018, Februari 08). *Miskin Tetapi Sejahtera*. Diambil kembali dari <http://krjogja.com>
- Todaro, M. (2005). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Tribunnews. (2017, Januari 15). *Jumlah Pengangguran di Yogyakarta Tercatat Sebanyak 6.721*. Diambil kembali dari: <http://jogja.tribunnews.com>
- Wati, H. W. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jurnal Ilmiah FEB UB*, 1-13.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. UII Yogyakarta: Ekonisia.
- Widodo, A. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* , Volume 1, Nomor 1.
- Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No.02.

